

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asia Timur merupakan sebuah sub-wilayah Asia yang luasnya sekitar 11,839,047 km². Asia Timur terletak diantara Rusia di utara dan di selatan Negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Wilayah Asia Timur membentang dari daerah gurun di Asia Tengah sampai di kepulauan Jepang dan Taiwan di kawasan pasifik barat. Sub-wilayah Asia Timur meliputi Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Taiwan, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, dengan populasi sekitar 1500 juta jiwa dan kepadatan 133 jiwa/km².

Amerika Serikat berkomitmen untuk menjadikan Asia Timur sebagai fokus utama di bidang politik, ekonomi, serta militer. Selain karena kawasan Asia Timur menjadi prioritas pertama Amerika Serikat, keterlibatan Amerika Serikat pada kawasan ini juga demi kepentingan masa depan Amerika Serikat dalam menjaga hegemoni di kawasan Asia. Keberlanjutan keterlibatan Amerika Serikat pada kawasan Asia di karenakan *Quadrennial Defense Review* (QDR) pada tahun 1997 menjelaskan komitmen Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas kawasan Asia. *Quadrennial Defense Review* (QDR) merupakan dokumen nasional Amerika Serikat untuk menjelaskan doktrin militer Amerika Serikat, yaitu dengan penggunaan kekuatan militer secara efektif demi kepentingan nasional Amerika Serikat (Cossa 2000). Komitmen Amerika Serikat diperjelas pada masa Presiden Obama dengan mengeluarkan "*The Pivot to Asia*" yaitu perubahan prioritas kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada kawasan Asia Timur (The foreign policy initiative 2012).

Aliansi militer Amerika Serikat-Jepang menjadi upaya dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Timur, karena dengan berkembangnya kekuatan militer Tiongkok, masalah konflik semenanjung Korea dan beberapa masalah sengketa wilayah membuat kawasan ini rentan konflik (Moore 2008). Amerika Serikat menilai kekuatan militer Tiongkok sebagai ancaman yang besar bagi kawasan. Tiongkok juga sangat agresif dalam sengketa kepulauan Senkaku dan Laut Cina

Selatan. Pada tahun 2006, terlihat Kebijakan pemerintah Tiongkok yang agresif pada sengketa kepulauan Senkaku dengan membangun pipa gas di Chunxiao sekitar kepulauan Senkaku kemudian kebijakan ini mendapat protes dari Jepang ketika pertemuan “*China-Japan Sea of Peace Cooperation and Friendship*” pada desember 2007.

Selain itu pada tahun 2006 terdapat ancaman senjata nuklir dari Korea Utara yang menjangkau hampir seluruh wilayah Asia Pasifik. Misil *Taepodong II* dan *Intercinental Ballistic Missile* atau ICBM milik Korea Utara memiliki jangkauan 3500-6000 km, dapat mengenai wilayah teritori Jepang (Moore 2008). Pada 9 oktober 2006 Korea Utara melakukan uji coba nuklir perdana dengan bahan Plutonium, bukan seperti pada masa sebelumnya hanya dengan uranium yang diperkaya. Uji coba yang dilakukan Korea Utara inilah yang memicu ketegangan keamanan di kawasan Asia Timur.

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah kerjasama militer bagi Amerika Serikat demi menjaga kepentingan di kawasan Asia Timur. Kepentingan Amerika Serikat pada kawasan Asia Timur menjadikan Jepang sebagai sekutu yang penting pada kawasan ini. Pada pertemuan antara Presiden George W. Bush dan perdana menteri Shinzo Abe pada 18 november 2006 terdapat kesepakatan peninjauan kerjasama keamanan bilateral Amerika Serikat-Jepang, khususnya di bidang pertahanan rudal balistik (BMD), dalam rangka memikirkan kembali potensi ancaman dari Korea Utara dan Tiongkok (Emma & Rinehart 2011).

Amerika Serikat meminta Jepang untuk terus meningkatkan kekuatan militernya agar mempermudah, memperlancar dan memperbanyak kerjasama militer kedua Negara. Presiden Bush meminta Jepang untuk segera mengubah kebijakan pertahanan dan keamanan demi memperkuat kekuatan aliansi militer Amerika Serikat-Jepang. Dengan semakin berkembangnya militer Jepang semakin mudah dan banyak kerjasama militer yang mungkin dilakukan Amerika Serikat-Jepang di masa mendatang. Dalam rangka perubahan kebijakan pertahanan dan keamanannya Jepang diminta Amerika Serikat untuk mendirikan kementerian Pertahanan agar dapat mengajukan anggaran pertahanan dengan lebih mudah. Ini

di ikuti perubahan doktrin militer yaitu meninggal kan pasal 9 Konstitusi 1947 yang melarang Jepang untuk memiliki kekuatan militer.

Amerika Serikat juga meminta Jepang mengubah doktrin pertahanannya yang lama dan mengganti dengan *white paper* pertahanan yang baru. Selanjutnya *National Defense Program Guidelines* (NDPG) paling baru yang dikeluarkan tahun 2010 atas dorongan dari Amerika Serikat dalam rangka merespon pengembangan kekuatan militer Tiongkok dan Korea Utara (Emma & Rinehart 2011). Perubahan penting yang terjadi adalah dengan di gantikannya “*Basic Defense Force Concept*” menjadi “*Dynamic Defense Force*” (*Japan Ministry of Defense 2010*). Artinya Jepang diminta aktif dalam keamanan kawasan, dan tidak hanya sekedar berlindung pada kekuatan militer Amerika Serikat. Atas dorongan Amerika Serikat, Jepang melakukan perubahan kebijakan pertahanannya ketika RUU usulan perdana Menteri Shinzo Abe yang dikaitkan transisi dari Badan Pertahanan Jepang untunk Kementrian Pertahanan di sahkan oleh majelis dan menjadi Undang-undang pada tanggal 15 desember 2006.

Jadi dapat disimpulkan ketika awal momentum Jepang mengubah kebijakan pertahanannya, pada saat itu pengaruh Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat masih didominasi oleh partai republik. Mendorong Jepang untuk melakukan perubahan kebijakan pertahanannya serta peningkatan anggaran aliansi militer Amerika Serikat, merupakan ciri dari Kebijakan Luar Negeri yang berdasarkan penggunaan militer. Amerika Serikat mulai lebih menaruh perhatian Kebijakan Luar Negeri mereka pada kawasan Asia Timur. Hal ini ditandai dengan agenda rapat kongres Amerika Serikat mengenai peluncuran senjata milik Korea Utara.

Kemudian Amerika Serikat mengubah sedikit prioritas, ketika Obama menjadi presiden pada tahun 2008. Kepentingan ekonomi menjadi prioritas utama Amerika Serikat pada kawasan Asia Timur selain kepentingan dibidang keamanan dan politik. Dalam mengamankan kepentingan ekonomi, Amerika Serikat masih memperkuat kekuatan aliansi militer bersama Jepang, karena masih ada ancaman kekuatan militer Tiongkok dan kepemilikan senjata nuklir Korea Utara. Kekuatan militer Tiongkok dan kepemilikan senjata nuklir Korea Utara dapat mengancam kepentingan ekonomi Amerika Serikat pada kawasan ini. Jadi Amerika

Serikat pada masa Obama masih memiliki kepentingan dalam aliansi bersama Jepang, Amerika Serikat tidak begitu saja meninggalkan atau meminimalkan hubungan aliansinya, walaupun Partai Demokrat yang tidak menganut paham *force* sedang berkuasa di pemerintahan.

Peningkatan status Badan Pertahanan menjadi Kementerian Pertahanan, peningkatan anggaran militer sejak kementerian pertahanan berdiri, perkembangan teknologi militer dan perubahan doktrin militer, merupakan perubahan kebijakan pertahanan yang telah dilakukan Jepang atas dorongan mitra aliansinya yaitu Amerika Serikat (Wang 2008). Perubahan kebijakan pertahanan ini mencerminkan adanya keinginan Amerika Serikat agar Jepang memainkan peran lebih besar dalam mengatasi ancaman keamanan di kawasan.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Penulis menjadikan Pertanyaan Penelitian yang akan penulis bahas adalah **“Bagaimana peranan Amerika Serikat dalam memperkuat Kebijakan pertahanan Jepang pada periode 2010 – 2012 ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

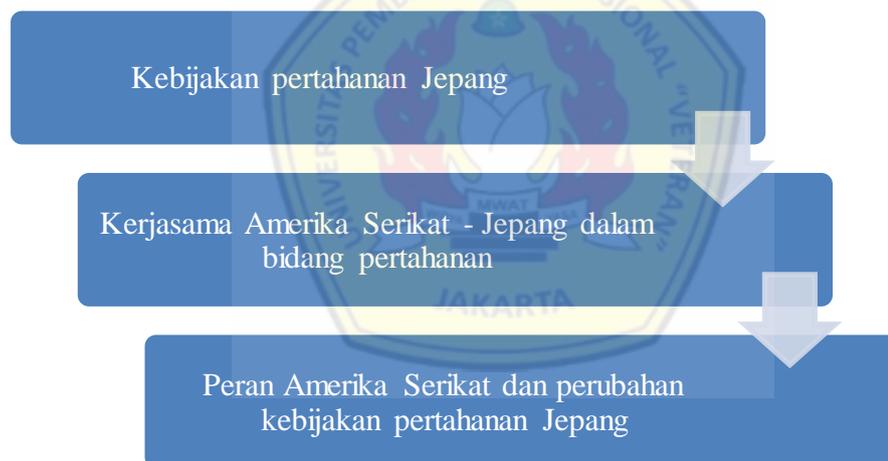
- 1.3.1 Untuk mengetahui peran Amerika Serikat dalam memperkuat kebijakan pertahanan Jepang 2010 – 2012.
- 1.3.2 Untuk menganalisa peran Amerika Serikat dalam memperkuat kebijakan pertahanan dengan menggunakan *regional security complex theory* dan aliansi.
- 1.3.3 Untuk mengetahui kerjasama keamanan Amerika Serikat dan Jepang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Secara akademis manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan data didalam jurusan ilmu hubungan internasional terutama konsentrasi pengkajian strategis mengenai peranan Amerika Serikat dalam memperkuat kebijakan pertahanan Jepang.
- 1.4.2 Secara praktis, diharapkan tulisan ini menjadi rujukan bagi penelitian serupa dimasa mendatang, khususnya tentang peran Amerika Serikat di kawasan Asia Timur.

1.5 Model Analisis



1.6 Asumsi

- a. Pasca Perang Dingin, kawasan Asia timur ditandai dengan berbagai konflik regional dan masalah internasional yang mengundang perhatian masyarakat dunia, khususnya tentang masalah keamanan yang menyangkut kapabilitas militer negara-negara di kawasan ini, seperti Jepang, China, Korea Selatan, Korea Utara dan Taiwan. Adanya

pembangunan kapabilitas militer negara-negara Asia Timur khususnya China dan Korea Utara membuat Jepang merasa terancam.

- b. Tahun 2007 menjadi awal momentum Jepang dalam transformasi militer dimana kementerian pertahanan Jepang dibentuk atas dorongan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat meminta perubahan doktrin militer Jepang sehingga dikeluarkan NDPG 2010, berisi bahwa orientasi “*Basic Defense Force Concept*” berubah menjadi “*Dynamic Defense Force*”.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian ini secara menyeluruh, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 Bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut antara lain:

- bab I** **Pendahuluan**
- Akan menjelaskan latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, dan Model Analisis.
- Bab II** **Tinjauan Pustaka**
- Akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu sebagai bagian dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang menjelaskan teori dan konsep yang digunakan sebagai alat analisa.
- Bab III** **Metode Penelitian**
- Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini. Metode penelitian akan menjelaskan tahapan-tahapan metode yang digunakan untuk menjalankan penelitian.
- Bab IV** **Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kebijakan pertahanan Jepang dan kerjasama antara Amerika Serikat dengan Jepang dalam bidang pertahanan. Bab ini juga akan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat dalam memperkuat**

kebijakan pertahanan Jepang, bentuk perubahan kebijakan pertahanan Jepang.

Bab V Simpulan

Bab keempat akan menjadi penutup dari hasil penelitian dari penulis. Dalam bab ini penulis mencoba untuk menyimpulkan sebuah jawaban yang berasal dari analisis data yang di peroleh penulis pada bab II dan bab III

